

Pengungsi Suriah dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keamanan Manusia di Timur Tengah Tahun 2026

Asep Muhammad Kartika¹, Novianti², Revalina Septia Putri³, Septianis Afipah⁴

^{1,2,3,4} Prodi Hubungan Internasional, Universitas Al-Ghifari Bandung

e-mail: asepmuhammadkartika@gmail.com¹, noviyantimeylani8@gmail.com²,
revalinasp478@gmail.com³, septianisafipah1990@gmail.com⁴

Abstrak

Krisis pengungsi Suriah yang berlangsung sejak 2011 telah memberikan tekanan multidimensional terhadap stabilitas keamanan manusia di kawasan Timur Tengah, khususnya di negara-negara penerima seperti Turki, Lebanon, dan Yordania. Kajian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) ini mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari laporan organisasi internasional, jurnal akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan menggunakan kerangka human security yang mencakup dimensi keamanan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Krisis pengungsi terbukti memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja dan distribusi sumber daya ekonomi, membebani kapasitas layanan kesehatan, serta memengaruhi dinamika hubungan sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal. Dampak-dampak tersebut saling berkaitan dan secara kolektif mencerminkan penurunan stabilitas keamanan manusia di tingkat kawasan. Penanganan krisis ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerja sama internasional secara berkelanjutan dan efektif guna menjamin perlindungan terhadap individu, baik pengungsi maupun masyarakat lokal di negara penerima.

Kata Kunci: Krisis Pengungsi, Suriah, Stabilitas Keamanan Manusia, Timur Tengah.

Abstract

The Syrian refugee crisis, ongoing since 2011, has exerted multidimensional pressure on human security stability across the Middle East, particularly in host countries such as Turkey, Lebanon, and Jordan. This qualitative library research draws on secondary data from international organization reports, academic journals, and relevant scholarly publications, analyzed through the human security framework encompassing economic, health, and social dimensions. The refugee crisis demonstrably strains labor markets and resource distribution, burdens healthcare service capacity, and disrupts social dynamics between refugees and host communities. These impacts are interconnected and collectively reflect a decline in human security stability at the regional level. Addressing this crisis requires a comprehensive approach involving sustained international cooperation to guarantee protection for both refugees and local populations in host countries.

Keywords: Refugee Crisis, Syria, Human Security Stability, Middle East.

LATAR BELAKANG

Krisis pengungsi merupakan salah satu isu kemanusiaan paling kompleks dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk akibat konflik, tetapi juga mencerminkan keterkaitan erat antara instabilitas politik, keruntuhan sosial-ekonomi, dan lemahnya sistem perlindungan internasional (International Organization for Migration, 2024). Dalam konteks Timur Tengah, konflik berkepanjangan di Suriah sejak tahun 2011 telah memicu salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern. Jutaan warga Suriah terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania. Skala perpindahan ini menjadikan krisis pengungsi Suriah sebagai isu regional yang berdampak luas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di kawasan (United Nations High Commissioner for Refugees, 2025).

Besarnya jumlah pengungsi yang masuk ke negara-negara penerima menimbulkan berbagai tantangan multidimensional. Di satu sisi, negara penerima dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, seperti akses terhadap pangan, kesehatan, dan tempat tinggal (United Nations Development Programme, 1994). Namun di sisi lain, kehadiran pengungsi dalam jumlah besar juga memberikan tekanan terhadap kapasitas domestik negara, terutama dalam sektor ekonomi, layanan publik, dan stabilitas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis pengungsi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan keamanan manusia *human security*.

Pendekatan keamanan manusia menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ini karena menempatkan individu sebagai pusat analisis, bukan negara. Dalam perspektif ini, keamanan tidak hanya diukur dari ketiadaan konflik bersenjata, tetapi juga dari kemampuan individu untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan pengungsi Suriah di negara-negara Timur Tengah dapat dipahami sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan manusia, baik bagi pengungsi itu sendiri maupun bagi masyarakat lokal di negara penerima (Tadibakhsh & Chenoy, 2007).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas krisis pengungsi Suriah, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana krisis ini secara spesifik memengaruhi stabilitas keamanan manusia di kawasan Timur Tengah, terutama dalam konteks perkembangan terkini. Banyak kajian cenderung berfokus pada aspek kemanusiaan atau kebijakan negara, namun belum secara komprehensif menghubungkannya dengan dimensi-dimensi keamanan manusia secara terintegrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana krisis pengungsi Suriah berdampak pada aspek keamanan ekonomi, kesehatan, dan sosial di negara-negara penerima.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana krisis pengungsi Suriah memengaruhi stabilitas keamanan manusia di kawasan

Timur Tengah. Pertanyaan ini kemudian dielaborasi ke dalam fokus analisis pada dimensi ekonomi, kesehatan, dan sosial sebagai bagian dari kerangka keamanan manusia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi krisis pengungsi Suriah terhadap stabilitas keamanan manusia di Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan human security. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak krisis pengungsi terhadap keamanan ekonomi, kesehatan, dan sosial di negara-negara penerima, serta menjelaskan dinamika yang memengaruhi hubungan antara pengungsi dan masyarakat lokal dalam konteks keamanan kawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai krisis pengungsi Suriah telah banyak dikembangkan dengan beragam fokus penelitian. (Savitri & Sudiar, 2025) menjelaskan bahwa konflik yang berlangsung lama di Suriah menimbulkan konsekuensi terhadap dinamika hubungan internasional sekaligus menghadirkan tantangan bagi negara-negara yang menerima pengungsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perpindahan penduduk dalam skala besar tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi di wilayah penerima. Penelitian lain oleh (Abdulqadir, 2025) mengkaji proses repatriasi pengungsi Suriah di Irak setelah terjadinya transisi politik di Suriah. Hasil kajian memperlihatkan bahwa upaya pemulangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti persoalan keamanan, keterbatasan ekonomi, serta kesiapan pemerintah dalam mendukung proses reintegrasi para pengungsi. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian krisis pengungsi tidak cukup hanya dengan berakhirnya konflik, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai faktor lainnya. Selain itu, (Yüksel, 2025) membahas kondisi Suriah pada periode transisi politik serta tantangan dalam menjamin perlindungan bagi pengungsi yang kembali ke negara asal. Penelitian tersebut menemukan adanya keterbatasan perlindungan dan persoalan ekonomi yang menyebabkan proses kepulangan belum berlangsung secara maksimal. Oleh karena itu, isu pengungsi Suriah masih menjadi perhatian penting bagi berbagai pihak di tingkat internasional. Di sisi lain, (International Crisis Group, 2021) menjelaskan bahwa krisis pengungsi Suriah tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas kawasan. Lembaga tersebut menekankan perlunya kolaborasi antara negara penerima, organisasi internasional, dan komunitas global untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi para pengungsi.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa mayoritas kajian masih berfokus pada repatriasi, kebijakan pengelolaan pengungsi, dan dinamika politik pascakonflik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis krisis pengungsi Suriah melalui pendekatan keamanan manusia dengan menelaah dampaknya terhadap stabilitas keamanan manusia di kawasan Timur Tengah, khususnya melalui dimensi keamanan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena krisis pengungsi Suriah serta implikasinya terhadap

keamanan manusia di kawasan Timur Tengah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena sosial-politik yang kompleks dan kontekstual.

Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan *library research*, dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang relevan. Data diperoleh dari laporan resmi organisasi internasional seperti UNHCR, UNDP, WHO, dan IOM, serta jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu pengungsi dan keamanan manusia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu dimensi keamanan manusia yang meliputi aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan kerangka konsep human security untuk mengidentifikasi hubungan antara krisis pengungsi Suriah dan stabilitas keamanan manusia di negara-negara penerima. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

LANDASAN TEORI

Konsep Human Security atau keamanan manusia mulai berkembang dalam kajian Hubungan Internasional sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang selama ini berfokus pada negara. Diskursus mengenai keamanan manusia dapat ditelusuri melalui berbagai perdebatan akademik sejak dekade 1960-an hingga 1990-an yang berupaya menggeser fokus keamanan dari negara menuju individu (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Dalam berbagai diskusi akademik pada periode tersebut, sejumlah kelompok pemikir internasional mulai menyoroti pentingnya keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan individu sebagai bagian dari agenda keamanan global. Perkembangan konsep ini semakin menguat ketika berbagai komisi internasional pada dekade 1980-an dan 1990-an mulai memberi perhatian pada beragam ancaman non-tradisional, seperti kesenjangan ekonomi global, kemiskinan, kelaparan, serta kerusakan lingkungan. Berbagai laporan internasional seperti Common Security Report, North-South Report, Our Common Future, serta laporan mengenai tata kelola global menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak hanya berasal dari konflik militer antarnegara, tetapi juga dari persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang secara langsung memengaruhi kehidupan manusia (Newman, 2010).

Konsep keamanan manusia kemudian memperoleh pengakuan yang lebih luas setelah diperkenalkan secara resmi dalam (United Nations Development Programme, 1994) yang diprakarsai oleh Mahbub ul-Haq melalui *United Nations Development Programme*. Laporan tersebut menekankan bahwa keamanan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perlindungan negara dari ancaman militer, tetapi juga sebagai upaya melindungi individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dalam kerangka tersebut, keamanan manusia dipahami sebagai pendekatan keamanan yang berpusat pada manusia *people-centered security* yang menekankan perlindungan individu dari berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional (United Nations, 2003). Ancaman tersebut tidak hanya mencakup kekerasan fisik atau konflik bersenjata, tetapi juga berbagai kondisi yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia, seperti kemiskinan,

ketidakstabilan ekonomi, kelaparan, penyakit, serta kerusakan lingkungan. Dengan demikian, konsep keamanan manusia memperluas pemahaman mengenai keamanan dengan menempatkan individu sebagai fokus utama analisis. Selain berkembang dalam ranah akademik, konsep keamanan manusia juga mulai diadopsi dalam praktik kebijakan internasional. Sejumlah negara dan organisasi internasional kemudian menjadikan keamanan manusia sebagai bagian dari agenda kebijakan luar negeri serta kerja sama internasional. Salah satu contohnya adalah pembentukan *Human Security Network* serta berbagai inisiatif internasional yang bertujuan memperkuat perlindungan individu dari berbagai ancaman global. Konsep keamanan manusia menegaskan bahwa keamanan tidak lagi semata-mata dipahami dalam konteks perlindungan negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia secara lebih luas. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan, keselamatan, serta martabat manusia sebagai pusat perhatian dalam analisis keamanan global (Kusuma, n.d.).

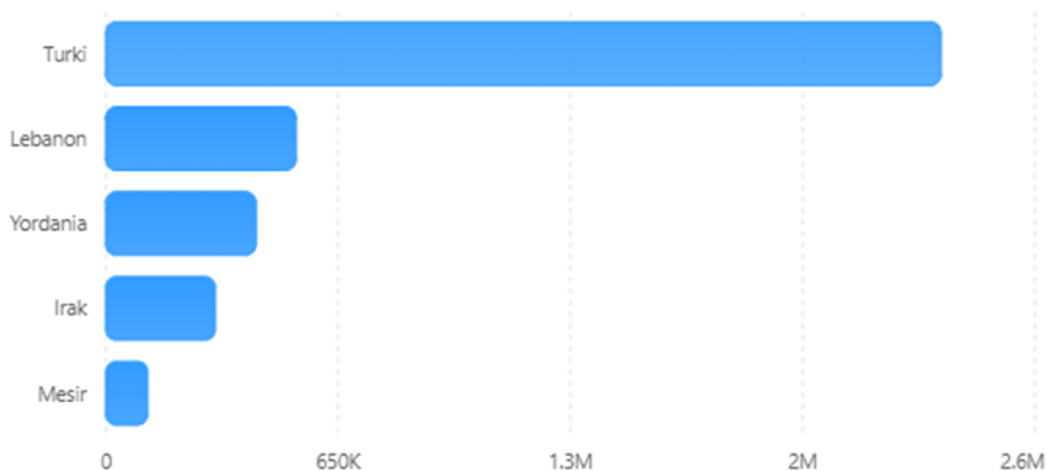
Pendekatan Human Security menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Konflik berkepanjangan di Syria telah menyebabkan jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mencari perlindungan di negara-negara sekitar seperti Turkey, Lebanon, dan Jordan. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar ini tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik bagi para pengungsi maupun masyarakat di negara penerima. Dalam kerangka human security, kondisi yang dialami para pengungsi dapat dipahami sebagai situasi yang rentan terhadap berbagai ancaman terhadap keamanan manusia. Para pengungsi sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak (Betts & Collier, 2017). Selain itu, keberadaan pengungsi dalam jumlah besar juga dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial di negara penerima yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan manusia di kawasan tersebut. Melalui pendekatan human security, krisis pengungsi tidak hanya dipahami sebagai fenomena migrasi akibat konflik, tetapi juga sebagai persoalan keamanan manusia yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan serta stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, konsep human security dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana krisis pengungsi mempengaruhi kondisi keamanan manusia di kawasan Timur Tengah secara lebih komprehensif (United Nations High Commissioner for Refugees, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis pengungsi Suriah yang berlangsung sejak 2011 telah berkembang menjadi fenomena regional yang tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga memengaruhi stabilitas keamanan manusia di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data dari berbagai laporan organisasi internasional, negara-negara seperti Turki, Lebanon, dan Yordania menjadi tujuan utama pengungsi Suriah dengan jumlah yang signifikan. Konsentrasi pengungsi di negara-negara tersebut menunjukkan adanya tekanan struktural terhadap kapasitas domestik, khususnya dalam sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Distribusi pengungsi Suriah di negara penerima utama

Data pengungsi Suriah terdaftar berdasarkan negara penerima utama (UNHCR).



Gambar 1 Source <https://data.unhcr.org/en/situations/syria>

Berdasarkan data terbaru dari UNHCR, jumlah pengungsi Suriah terdaftar di kawasan mencapai sekitar 3,76 juta jiwa (United Nations High Commissioner for Refugees, 2025). Sebagian besar berada di Turki sebagai negara penerima utama dengan sekitar 2,34 juta pengungsi, diikuti Lebanon sekitar 532 ribu, Yordania sekitar 420 ribu, Irak sekitar 306 ribu, dan Mesir sekitar 117 ribu. Distribusi ini menunjukkan bahwa konsentrasi pengungsi masih terpusat di negara-negara tetangga Suriah dan memberikan tekanan terhadap kapasitas ekonomi, kesehatan, serta sosial negara penerima.

Data distribusi pengungsi di atas bersumber dari UNHCR Syria Situation Operational Data Portal yang diakses per Maret 2026 dan secara konsisten diperbarui berdasarkan laporan registrasi resmi di masing-masing negara penerima. Keabsahan data ini diperkuat oleh kesesuaiannya dengan laporan UNOCHA Global Humanitarian Overview 2026 yang juga mencatat konsentrasi pengungsi Suriah tertinggi berada di Turki, Lebanon, dan Yordania

(International Organization for Migration, 2024). Validitas angka-angka tersebut dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui laporan tahunan IOM World Migration Report serta publikasi WHO mengenai kesehatan pengungsi di kawasan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi standar kredibilitas sumber primer organisasi internasional yang diakui secara akademik.

Dalam perspektif *human security*, kondisi ini merefleksikan adanya kerentanan multidimensional yang tidak hanya dialami oleh pengungsi, tetapi juga oleh masyarakat lokal di negara penerima. Dengan demikian, krisis pengungsi Suriah dapat dipahami sebagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan stabilitas keamanan manusia di tingkat regional.

1. Dampak terhadap Keamanan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa kehadiran pengungsi dalam jumlah besar memberikan tekanan terhadap sektor ekonomi di negara penerima, khususnya dalam pasar tenaga kerja dan distribusi sumber daya ekonomi. Sebagian besar pengungsi Suriah bekerja di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah serta minim perlindungan hukum (World Bank, 2020). Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kerentanan ekonomi yang dialami pengungsi, tetapi juga menunjukkan keterbatasan negara dalam menyediakan akses ekonomi yang inklusif.

Dalam kerangka *human security*, fenomena ini mengindikasikan adanya gangguan pada dimensi *economic security*, di mana individu tidak memiliki jaminan terhadap sumber penghidupan yang stabil. Lebih jauh, kehadiran tenaga kerja informal dari kalangan pengungsi juga memicu persepsi persaingan dengan masyarakat lokal, terutama di sektor pekerjaan berupah rendah. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketegangan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan integrasi ekonomi yang efektif (Betts & Collier, 2017).

Namun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa pengungsi tidak semata-mata menjadi beban ekonomi. Dalam beberapa kasus, mereka turut berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal melalui sektor informal, peningkatan konsumsi, serta pembentukan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi krisis pengungsi bersifat ambivalen dan sangat bergantung pada kapasitas kebijakan negara dalam mengelola integrasi ekonomi pengungsi (World Health Organization, 2022).

2. Dampak terhadap Keamanan Kesehatan

Dalam dimensi kesehatan, meningkatnya jumlah pengungsi berdampak langsung pada kapasitas layanan kesehatan di negara penerima. Data menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan terhadap layanan medis dasar, vaksinasi, serta fasilitas sanitasi di wilayah dengan konsentrasi pengungsi tinggi. Hal ini menyebabkan sistem kesehatan domestik menghadapi tekanan yang signifikan, terutama di negara dengan sumber daya terbatas seperti Lebanon dan Yordania (World Health Organization, 2022).

Dari perspektif *human security*, kondisi ini mencerminkan terganggunya *health security*, di mana akses terhadap layanan kesehatan yang memadai menjadi terbatas (World Health Organization, 2023). Pengungsi seringkali berada dalam kondisi tempat tinggal yang tidak layak, dengan kepadatan tinggi dan akses terbatas terhadap air bersih serta sanitasi.

Situasi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular serta gangguan kesehatan mental akibat trauma konflik dan migrasi paksa.

Lebih lanjut, keterbatasan kapasitas negara penerima dalam menyediakan layanan kesehatan secara merata menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan organisasi internasional (United Nations Children's Fund, 2024). Hal ini menegaskan bahwa penanganan krisis pengungsi tidak dapat dilepaskan dari peran aktor global dalam menjamin keberlangsungan keamanan kesehatan bagi pengungsi (World Health Organization, 2023).

3. Dampak terhadap Keamanan Sosial dan Komunitas

Krisis pengungsi Suriah juga berdampak pada dinamika sosial di negara-negara penerima, khususnya dalam hubungan antara pengungsi dan masyarakat lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengungsi berkontribusi terhadap perubahan komposisi demografis serta meningkatnya tekanan terhadap layanan publik seperti pendidikan dan perumahan (International Crisis Group, 2024).

Dalam kerangka *human security*, kondisi ini berkaitan dengan dimensi *community security*, yaitu stabilitas hubungan sosial dan perlindungan identitas kelompok. Tekanan terhadap sumber daya yang terbatas seringkali memunculkan persepsi negatif terhadap pengungsi, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik sosial di tingkat lokal (United Nations Children's Fund, 2024).

Meskipun demikian, berbagai upaya integrasi sosial telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kegiatan sosial yang melibatkan pengungsi dan masyarakat lokal. Upaya ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengungsi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan integrasi yang diterapkan (United Nations High Commissioner for Refugees, 2025).

4. Implikasi terhadap Stabilitas Keamanan Manusia di Kawasan

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa krisis pengungsi Suriah memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas keamanan manusia di kawasan Timur Tengah. Dampak yang muncul bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya (Programme, 1994). Tekanan ekonomi dapat memicu ketegangan sosial, sementara keterbatasan layanan kesehatan dapat memperburuk kondisi kesejahteraan pengungsi dan masyarakat lokal.

Dalam perspektif hubungan internasional, fenomena ini menegaskan bahwa krisis pengungsi merupakan isu lintas batas yang memerlukan pendekatan kolektif. Ketergantungan negara penerima terhadap dukungan organisasi internasional menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas domestik dalam mengelola krisis secara mandiri (United Nations, 2003). Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas keamanan manusia di kawasan (Newman, 2010).

Dengan demikian, krisis pengungsi Suriah tidak hanya mencerminkan dampak konflik bersenjata, tetapi juga menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana negara dan komunitas internasional mampu menjamin keamanan manusia dalam situasi krisis. Pendekatan *human security* memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk

memahami keterkaitan antara berbagai dimensi ancaman serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan (International Crisis Group, 2024).

KESIMPULAN

Krisis pengungsi Suriah terbukti memengaruhi stabilitas keamanan manusia di Timur Tengah melalui tekanan pada dimensi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar meningkatkan beban pasar tenaga kerja, layanan kesehatan, dan hubungan sosial di negara-negara penerima, terutama Turki, Lebanon, dan Yordania. Dampak tersebut bersifat multidimensional dan saling berkaitan sehingga menurunkan tingkat keamanan manusia di kawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa krisis pengungsi Suriah tidak hanya merupakan isu kemanusiaan, tetapi juga isu keamanan manusia yang memerlukan penanganan komprehensif melalui kerja sama internasional yang berkelanjutan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulqadir, F. S. (2025). Repatriation As A Durable Solution For Syrian Refugees In Iraq: Challenges And Opportunities Post-Syria's Political Transition. *Al-Rafidain Journal Of Political Science*.
- Betts, A., & Collier, P. (2017). *Refuge: Transforming A Broken Refugee System*. Allen Lane.
- International Crisis Group. (2021). *The Abraham Accords And The Changing Dynamics Of Middle East Politics*.
- International Crisis Group. (2024). *Syria's Refugee Dilemma: Return, Reintegration, And Regional Stability*.
- International Organization For Migration. (2024). *World Migration Report 2024*.
- Kusuma, A. S. (N.D.). *Human Security Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*.
- Newman, E. (2010). Critical Human Security Studies. *Review Of International Studies*, 36(1), 77–94.
- Programme, U. N. D. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions Of Human Security*. Oxford University Press.
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostatpdf.pdf>
- Savitri, A. A., & Sudiar, S. (2025). Aulia\ Ariyani\ Savitri\ Jurnal\ 1902046005 (02-03 26-04-21-49). *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 13.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts And Implications*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203960939>
- United Nations. (2003). *Human Security Now: Protecting And Empowering People*. Commission On Human Security.
- United Nations Children's Fund. (2024). *Syria Crisis Situation Report*.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions Of Human Security*. <http://hdr.undp.org>
- United Nations High Commissioner For Refugees. (2025). *Global Trends: Forced Displacement In 2024*.
- World Bank. (2020). *The Mobility Of Displaced Syrians: An Economic And Social Analysis*.
- World Health Organization. (2022). *World Report On The Health Of Refugees And Migrants*.

- World Health Organization. (2023). *Refugee And Migrant Health: Global Competency Standards For Health Workers*.
- Yüksel, U. (2025). Syria In Transition: Political Promises, Economic Challenges, And The Protection Gap In Refugee Returns. *International Journal Of Human Mobility*, 5(1).